

PENGARUH PROGRAM REALISASI DANA PENDIDIKAN TERHADAP PEMENUHAN AKSES PENDIDIKAN JENJANG SMA/SMK DI PROVINSI INDONESIA TAHUN 2020-2022

Mailinda Utami Anandhari¹; Silviana²
Universitas Widyatama, Bandung, Indonesia^{1,2}
Email : mailinda.utami@widyatama.ac.id

ABSTRAK

Ketidakmerataan akses pendidikan dan layanan pendidikan di Indonesia dalam upaya memaksimalkan Angka Partisipasi Kasar (APK) akan terus membatasi pencapaian wajib belajar 12 tahun sehingga perlunya program kerja pemerintah yang didukung oleh anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam memfasilitasi serta mengimplementasikan wajib belajar agar dapat terlaksana sesuai harapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah program-program pemerintah di bidang pendidikan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang pendidikan yang dialokasi didalam APBN, serta belanja fungsi pendidikan yang dialokasikan didalam APBD, berpengaruh terhadap APK SMA/SMK. Pendekatan kuantitatif diterapkan dalam penelitian ini dengan menggabungkan metode deskriptif dan asosiatif kausal. Alat analisis dalam mengolah data regresi data panel menggunakan program Eviews 12 yang menghasilkan pemilihan model Random Effect Model. Penelitian ini mencakup 34 provinsi di Indonesia yang memenuhi kriteria selama periode 2020-2022 dengan total sampel sebanyak 102. Hasil uji dari penelitian ini menunjukkan bahwa program realisasi dana pendidikan berupa BOS tidak memiliki pengaruh dan menunjukkan hubungan negatif terhadap APK jenjang SMA/SMK, DAK Fisik bidang pendidikan tidak memiliki pengaruh tetapi memiliki hubungan positif terhadap APK jenjang SMA/SMK, serta Belanja Fungsi Pendidikan pada APBD juga tidak berpengaruh dan memiliki hubungan negatif terhadap APK jenjang SMA/SMK dikarenakan alokasi yang kurang tepat, pengelolaan yang lemah, prioritas provinsi yang berbeda, serta dana BOS hanya menutupi sebagian kecil biaya pendidikan.

Kata Kunci : Bantuan Operasional Sekolah; Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan; Belanja Fungsi Pendidikan pada APBD; Angka Partisipasi Kasar

ABSTRACT

In an effort to maximize the Gross Participation Rate (APK) in Indonesia, the existence of inequality in access to education and education services will limit the achievement of compulsory 12-year education. Therefore, it is necessary to have a government work program supported by the budget from the State Budget (APBN) and the Regional Budget (APBD) in facilitating and implementing compulsory education can be carried out as expected. This study aims to examine whether government programs in education, such as the School Operational Assistance (BOS) and the Special Allocation Fund (DAK) for Physical Education allocated in the APBN, as well as education function expenditure allocated in the APBD, have an effect on APK at the SMA/SMK level. A quantitative approach is used in this study by combining descriptive and causal associative methods. The analytical tool in panel data regression processing uses the Eviews 12 program with Random Effect Model results. This study covers 34

provinces in Indonesia that meet the criteria during the period 2020-2022 with a total sample of 102. The test results of this study show that the education fund realization program in the form of BOS has no effect and shows a negative relationship to the APK of SMA / SMK level, DAK Fisik in the education sector has no effect but has a positive relationship to the APK of SMA / SMK level, and the Education Function Expenditure in the APBD also has no effect and has a negative relationship to the APK of SMA / SMK level due to improper allocation, weak management, different provincial priorities, and BOS funds only cover a small portion of education costs.

Keywords : School Operational Assistance; Special Allocation Fund for Physical Education; Education Function Expenditure in APBD; Gross Enrollment Rate

PENDAHULUAN

Salah satu komponen penting visi pemerintah Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025-2045, yaitu menargetkan kemajuan pembangunan manusia serta menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) melalui proses percepatan pendidikan yang dilakukan secara merata. lebih lanjut, sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 pemerintah telah berkomitmen untuk memastikan layanan pendidikan bermutu dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Pentingnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia diperlukan dukungan anggaran yang cukup melalui program pendidikan dengan sasaran yang memiliki tujuan yang tepat dan terukur.

Hambatan masyarakat dalam menyekolahkan anak menunjukkan perlunya upaya pemerintah daerah untuk memfasilitasi dan memastikan implementasi wajib belajar berjalan baik dan tepat sasaran. Menurut Puspita et al. (2021), angka partisipasi sekolah menjadi indikator untuk mengukur keberhasilan layanan publik di bidang pendidikan. Pratiwi (2018), menambahkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam pemerataan pendidikan untuk mencapai target wajib belajar 12 tahun. Angka Partisipasi kasar (APK) digunakan dalam penelitian ini sebagai ukuran menilai keberhasilan pemerataan pendidikan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (2014) semakin tinggi nilai APK maka tingkat partisipasi sekolah akan semakin tinggi, terlepas dari apakah siswa tersebut berada pada usia yang sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Pemerataan kualitas pendidikan tercermin berdasarkan program pemerintah yang dicapai dengan adanya dukungan anggaran pendidikan minimal 20% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD), sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat. Besarnya anggaran ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat maupun daerah dalam mendukung layanan pendidikan bagi masyarakat melalui program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan, dan Belanja Fungsi Pendidikan dalam APBD. Program tersebut bertujuan meringankan beban finansial keluarga kurang mampu, meningkatkan akses pendidikan sekolah dasar dan menengah, serta mendukung pencapaian wajib belajar 12 tahun (Aziz, 2010)

Meski 20% anggaran pendidikan dari APBN dan APBD, ternyata berbanding terbalik terhadap fenomena lapangan pendidikan di Indonesia. Berdasarkan data pada Kementerian Keuangan (2023) menyatakan bahwa peningkatan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan terjadi setiap tahun. Tingkat pertumbuhan alokasi anggaran pendidikan pada tahun 2023 mencapai 5,8% dari anggaran tahun 2022, sedangkan pertumbuhan anggaran tahun 2022 mengalami peningkatan yang paling tinggi mencapai 19,9% dibandingkan dengan tahun 2021 hanya meningkat 1,3% dari tahun 2020, serta anggaran tahun 2020 meningkat sebesar 6,6% dari tahun 2019.

Belum tercapainya target APK dalam RPJMN 2020-2024 menjadi kendala meratanya akses pendidikan serta percepatan dalam menerapkan wajib belajar 12 tahun, terutama untuk mengatasi ketimpangan pelayanan pendidikan antar wilayah (Kawasan Barat Indonesia-Kawasan Timur Indonesia, Jawa-luar Jawa) di Provinsi Indonesia yang didasarkan data yang tercatat pada Badan Pusat Statistik menunjukkan perbandingan bahwa APK jenjang SMA/SMK/ sederajat tingkatannya lebih rendah dari pada APK tingkat SD/ sederajat dan SMP/ sederajat, meskipun alokasi anggaran pendidikan diharapkan meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan. Selain itu, dana pendidikan 20% dari APBD belum merata karena perbedaan Pendapatan Asli Daerah antarprovinsi.

Berdasarkan data Kemendikbudristek (2023), secara nasional terdapat 10 daerah provinsi Indonesia memiliki APK kurang dari standar rata-rata secara nasional pada tahun 2020-2022, dengan capaian APK SMA/SMK/MA/ Sederajat belum mencapai target. Pada tahun 2020, APK sebesar 84,53% dengan target 86,18%, meningkat menjadi 85,23% pada tahun 2021 dan 85,49% pada tahun 2022, namun tetap di bawah target 88,39%. Merujuk data Pusdatin Kemendikbudristek (2024), alokasi anggaran

pendidikan di Papua masih di bawah 20%, menyebabkan APK di bawah standar rata-rata nasional. Sementara itu, beberapa provinsi seperti Kalimantan Tengah, Banten, Jambi, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Barat, dan DKI Jakarta, meski memiliki anggaran pendidikan di atas 20%, belum mampu meningkatkan APK nasional. Banyak masyarakat yang masih kesulitan mengakses pendidikan karena bantuan pemerintah belum tepat sasaran.

Penelitian ini fokus pada APK jenjang SMA/SMK, mencakup lembaga sekolah yang ada negeri maupun swasta, tidak termasuk madrasah di bawah binaan Kementerian Agama. Ketidakmerataan akses pendidikan di Indonesia yang memperlihatkan gap yang cukup besar antar wilayah di Indonesia, khususnya Provinsi Papua memiliki APK terendah, jauh di bawah rata-rata nasional, sementara Jawa Barat juga menunjukkan APK yang lebih rendah jika dibandingkan provinsi di luar Pulau Jawa. Meskipun Jawa Barat dekat dengan pusat ekonomi dan politik DKI Jakarta dan memiliki akses yang unggul terhadap pendidikan. APK SMA/SMK/Sederajat di provinsi ini tetap rendah, sehingga menunjukkan masih minimnya partisipasi masyarakat pada jenjang pendidikan menengah (Khairunnisa et al., 2014).

Target APK pendidikan menengah tahun 2020 sebesar 97% sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No 80 Tahun 2013, target sulit tercapai karena data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menunjukkan APK provinsi masih di bawah capaian nasional.

Beberapa penelitian dilakukan untuk menilai bagaimana hasil pendidikan dipengaruhi oleh program pemerintah, namun temuan yang dihasilkan beragam. Faguet & Sánchez (2008) menunjukkan bahwa anggaran belanja untuk sektor pendidikan mempengaruhi hasil pendidikan melalui APK. Aziz (2010) menemukan hubungan yang kuat antara peningkatan dana pendidikan dan APK, sehingga menyarankan pemerintah meningkatkan alokasi dana untuk pendidikan. Penelitian yang dilakukan Jolianis (2015) juga menyimpulkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk sektor pendidikan terhadap partisipasi sekolah di Sumatera Barat mempunyai pengaruh positif dan signifikan. Diperkuat oleh penelitian Bui et al. (2020), menunjukkan peningkatan partisipasi sekolah dasar dan menengah di Vietnam sebagai hasil kebijakan pengurangan biaya sekolah dan pemberian subsidi.

Namun, beberapa penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda. Arunatilake (2006) menyatakan bahwa program kesejahteraan pemerintah untuk membantu anak-anak usia sekolah, seperti buku gratis, seragam, subsidi transportasi, dan makan siang, tidak berdampak pada peningkatan partisipasi sekolah. Ferina et al. (2015) juga menunjukkan bahwa belanja pemerintah pada fungsi pelayanan umum, ekonomi, dan pendidikan tidak mempengaruhi terhadap partisipasi sekolah. Halim et al. (2010) melakukan penelitian dengan hasil bahwa tidak adanya hubungan partisipasi sekolah menengah dengan anggaran belanja pendidikan.

Belum optimalnya dalam memaksimalkan APK akan terus membatasi pencapaian wajib belajar 12 tahun (Kemendikbudristek, 2023) , sehingga Peneliti melihat lebih dalam mengenai sejauh mana pelayanan pemerintah di bidang pendidikan pada program dana pendidikan melalui APBN dan APBD dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan pada tingkat provinsi Indonesia. Hal ini penting bagi pemangku kepentingan pusat dan daerah untuk merumuskan regulasi berdasarkan penelitian, sebagai kelanjutan program wajib belajar 9 Tahun menuju wajib belajar 12 Tahun, serta dapat memperluas pengetahuan dan wawasan tentang masalah capaian pemerataan angka partisipasi kasar sebagai outcome dari adanya anggaran pemerintah bidang pendidikan baik APBN maupun APBD. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar kontribusi yang sifatnya mengarah pada perbaikan, dan informasi tambahan bagi pihak-pihak yang terkait.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Desentralisasi Pendidikan

Shaleh (2014) mengemukakan bahwa desentralisasi pendidikan melibatkan pendelegasian otoritas yang lebih luas dari pemerintah pusat dalam aspek kebijakan dan pendanaan pendidikan ke pemerintah daerah, termasuk kewenangan yang lebih besar kepada sekolah. Namun, tanpa dukungan anggaran yang memadai, upaya perencanaan pendidikan di daerah sulit meningkatkan mutu pendidikan di suatu daerah tertentu maupun di tingkat nasional.

Pendidikan Sebagai Barang Merit

Sebagai *merit good*, pendidikan dibutuhkan oleh semua individu, tetapi tidak semua mampu memperolehnya. *Merit good* adalah kombinasi barang pribadi dan publik, di mana manfaatnya dirasakan secara individu tetapi merupakan kebutuhan bagi semua

masyarakat secara umum. Hal ini terjadi karena pendidikan memerlukan biaya dengan menyesuaikan kebijakan tarif yang ditetapkan pemerintah, sehingga pemerintah memiliki peran krusial untuk menjamin pemerataan akses pendidikan (Dwiputrianti, 2012). Pendidikan sebagai *merit good*, memberi kesempatan bagi berbagai pihak baik pemerintah dan swasta untuk dapat menyediakan layanan pendidikan yang optimal, dengan pemerintah mengawasi aspek seperti permintaan, penawaran, sarana, prasarana dan harga. Pendidikan juga menghasilkan eksternalitas positif, di mana manfaatnya bagi masyarakat melebihi biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, pemerintah sangatlah wajar memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi dan subsidi untuk mendukung pendidikan secara keseluruhan (Ridwan & Nawir, 2021).

Teori Kebutuhan Pendidikan serta Ketersediaan Pendidikan

Menurut Todaro & Smith (2006), pendidikan merupakan elemen dasar dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dan mendukung perkembangan sosial serta ekonomi lebih baik. Tingkat pendidikan bergantung pada pengaruh interaksi antara permintaan dan penawaran pendidikan.

Dari perspektif penawaran, layanan dan fasilitas pendidikan di negara berkembang umumnya dikelola pemerintah dan lebih sering dipengaruhi dinamika politik baik parlemen maupun pihak lainnya. Selain itu, penawaran pendidikan dipengaruhi oleh permintaan agregat masyarakat terhadap pendidikan, juga bergantung pada alokasi anggaran pemerintah, seperti pembatasan dana dalam APBN dan APBD di Indonesia.

Dari sisi permintaan, tingkat pendidikan dipengaruhi oleh dua faktor utama:

1. Manfaat individu, yaitu peluang pekerjaan dengan pendapatan tinggi di sektor modern seperti dokter, dosen, akuntan, atau manajer, yang biasanya berlokasi di perkotaan.
2. Biaya pendidikan, secara langsung dan tidak langsung, dinilai berdasarkan perbandingan manfaat yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan.

Anggaran Pendidikan

Anggaran pendidikan, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, dipertanggungjawabkan oleh pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Sebagai belanja wajib (*mandatory spending*), undang-undang mengharuskan alokasi minimal 20% untuk anggaran pendidikan baik dari APBN maupun APBD. Faustine &

Sutoko (2005) menegaskan bahwa penggunaan dana harus efektif dan hati-hati demi manfaat maksimal.

Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana BOS adalah salah satu komponen dari DAK nonfisik yang termasuk kedalam Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOSP). Atas dasar Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022, Dana BOSP adalah DAK nonfisik digunakan untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia di satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar, serta dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Pembahasan ini, penulis berfokus pada Dana BOS Reguler Menengah untuk membiayai operasional rutin SMA/SMK baik negeri maupun swasta.

Sehingga BOS adalah bantuan pemerintah bagi siswa yang disalurkan melalui lembaga pendidikan, berdasarkan perhitungan jumlah siswa yang tercatat mempunyai NISN di satuan pendidikan penerima BOS Reguler sesuai dengan data Dapodik.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan

Sesuai dengan Peraturan Menteri pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022, DAK Fisik Bidang Pendidikan yaitu dana yang bersumber dari APBN dialokasikan ke daerah tertentu guna membiayai pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, sesuai dengan kewenangan daerah serta prioritas nasional. Sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, pendidikan termasuk dalam DAK Fisik Reguler yang bertujuan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

DAK termasuk ke dalam bantuan tidak rutin, diberikan dalam satu tahun tertentu. Sekolah yang telah menerima DAK tidak akan mendapatkannya kembali, kecuali masih memiliki kebutuhan yang belum terpenuhi atau memerlukan dukungan fisik yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan tiap sekolah (Sari dkk., 2019).

Belanja Fungsi Pendidikan pada APBD

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 anggaran belanja fungsi pendidikan adalah tanggung jawab wajib pemerintah daerah sebagai bagian dari pelayanan dasar yang menjadi hak setiap warga negara. Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam APBD menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.07/2009, pemerintah daerah wajib mengalokasikan minimal

20% dari APBD di luar dana perimbangan untuk belanja fungsi pendidikan dimanfaatkan untuk mendanai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk pembayaran gaji pendidik, namun tidak mencakup pendidikan kedinasan.

Akses Pemerataan Pendidikan

Salah satu indikator pemerataan pendidikan adalah APK (Pratiwi, 2018). Untuk meningkatkan APK di tingkat menengah, pemerintah meluncurkan Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) pada 2013, bertujuan menyediakan pendidikan menengah yang merata dan berkualitas di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan memperluas akses bagi warga negara Indonesia antara rentang usia 16–18 tahun serta meningkatkan APK pendidikan menengah hingga 97% pada 2020.

Pemerintah pusat, daerah, dan Masyarakat bertanggungjawab terhadap pendanaan PMU, dengan sumber dana diperoleh dari APBN maupun APBD, kontribusi masyarakat, serta sumber lain yang sah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). Menurut Puspita et al. (2021), angka partisipasi sekolah adalah indikator keberhasilan layanan publik di bidang pendidikan. Penelitian ini menggunakan APK sebagai indikator untuk keberhasilan pemerataan pendidikan. Menurut Suparman et al. (2022), APK merupakan suatu perbandingan antara jumlah siswa pada suatu jenjang SD/SLTP/SLTA tanpa batas usia dibandingkan dengan jumlah penduduk rentang usia 7–18 tahun.

Indikator ini sering dipakai untuk melihat kondisi pendidikan di berbagai negara. Menurut UNESCO (2009) mendefinisikan APK atau Gross Enrollment Ratio (GER) menggambarkan total partisipasi dalam suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa mempertimbangkan usia, dinyatakan sebagai persentase dari populasi usia siswa bersekolah, sejalan dengan jenjang pendidikan yang sama di tahun ajaran tertentu.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Dana Bantuan Operasional Sekolah Terhadap Angka Partisipasi Kasar

Program BOS, didanai APBN, yaitu langkah pemerintah pusat dalam mengimplementasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Aturan tersebut menegaskan bahwasanya pemerintah pusat serta daerah bertanggung jawab menyelenggarakan minimal pendidikan dasar tanpa pungutan biaya sebagai

bagian dari terselenggaranya wajib belajar, melalui lembaga pendidikan yang dikelola pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.

Menurut Kementerian Keuangan (2015) untuk mendukung wajib belajar 12 tahun pemerintah fokus terhadap Program BOS Sekolah Menengah. Dana ini dialokasikan ke SMA /SMK negeri maupun swasta, bertujuan memberikan bantuan pembiayaan operasional nonpersonalia dalam meningkatkan APK siswa. Subsidi ini bertujuan mengurangi biaya pendidikan sehingga dapat meningkatkan daya beli, dan berdampak pada mendorong partisipasi masyarakat dalam pendidikan (Rutfiana & Hayati, 2020).

Beberapa penelitian terdahulu yang telah mengkaji penelitian serupa adalah Penelitian yang dilakukan oleh (Rutfiana & Hayati, 2020), Dahiri (2023), dan Aziz (2010), mengungkapkan bahwasanya alokasi dana BOS terhadap peningkatan APK berpengaruh positif dan signifikan.

H₁: Dana BOS jenjang SMA/SMK berpengaruh terhadap APK Jenjang SMA/SMK di Provinsi Indonesia Tahun 2020-2022.

Pengaruh Alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Terhadap Angka Partisipasi Kasar

DAK Fisik Bidang Pendidikan, didanai oleh APBN berguna untuk membantu sekolah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam mencapai SPM dan SNP. Program ini bertujuan memperluas akses pendidikan melalui ketertarikan para siswa untuk dapat meneruskan pendidikan hingga tingkat lanjut sehingga mendukung pencapaian program wajib Belajar 12 Tahun, sebagaimana tertera dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.

Melalui bantuan ini memungkinkan sekolah memperbaiki serta meningkatkan sarana dan prasarana tanpa menarik biaya tambahan dari orang tua siswa, Tujuan utamanya adalah untuk mencapai hasil dari outcome berdasarkan APK yang merupakan strategi perencanaan Kemendikbud dalam RPJMN 2020 – 2024 (Kementerian Pendidikan, 2022).

Penelitian Aziz (2010) dan Aryfyani (2020) membahas pengaruh DAK Pendidikan terhadap APK. Aziz menemukan bahwa alokasi DAK memiliki pengaruh signifikan pada APK Wajib Belajar, namun keterbatasan rehabilitasi kelas dapat

mengurangi kapasitas penerimaan siswa baru yang mempengaruhi APK. Sementara itu Aryfyani menemukan bahwa DAK meningkatkan APK di tingkat SD dan SMP.

H₂: Alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan jenjang SMA/SMK berpengaruh terhadap APK Jenjang SMA/SMK di Provinsi Indonesia Tahun 2020-2022

Pengaruh Belanja Fungsi Pendidikan Pada APBD Terhadap Angka Partisipasi Kasar

Pemerintah daerah setidaknya wajib mengalokasikan paling sedikit 20% untuk kepentingan pendidikan dari APBD, menggunakan Pendapatan Daerah yang diperoleh, sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.07/2009. Anggaran ini tidak termasuk dana perimbangan yang diperuntukan untuk belanja fungsi pendidikan.

Penerapan kebijakan alokasi wajib dana pendidikan dalam APBD oleh Pemerintah Daerah diharapkan meningkatkan partisipasi sekolah di wilayah tersebut. Penyediaan anggaran pendidikan dianggap sebagai investasi penting guna membangun SDM yang unggul dan kompetitif, menjadikan belanja pendidikan sebagai faktor penentu dalam mencapai target APK.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa alokasi belanja pendidikan dalam APBD berhubungan positif dengan APK. Faguet & Sánchez (2008) menemukan bahwa semakin besar belanja pendidikan daerah, semakin tinggi partisipasi sekolah. Wardani & Arsandi (2020) juga menyatakan bahwa belanja pendidikan secara signifikan meningkatkan akses pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan alokasi dana pendidikan di tingkat kabupaten/kota diperlukan untuk meningkatkan akses pendidikan, terutama pada tingkatan SMA.

H₃: Belanja Fungsi Pendidikan Pada APBD berpengaruh terhadap APK Jenjang SMA/SMK di Provinsi Indonesia Tahun 2020-2022

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020:229).

Populasi dan Sampel Penelitian

Peneliti menggunakan populasi meliputi seluruh pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia dengan total 34 provinsi. Sampel diambil dengan menggunakan metode *non probability Sampling* sebagai pengambilan sampel. Sedangkan teknik yang di pilih adalah Teknik *purposive sampling* sehingga sampel data diperoleh dari 34 pemerintah provinsi dengan 3 tahun penelitian sehingga diperoleh 102 sampel.

Desain Penelitian

Pendekatan kuantitatif diterapkan dalam penelitian ini dengan menggabungkan metode deskriptif dan asosiatif kausal. Pendekatan deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan antar variabel sedangkan asosiatif kausal digunakan dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel.

Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

variabel-variabel penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Variabel independen atau variabel bebas (X):

- a. Realisasi Dana BOS (X_1) SMA/SMK baik negeri atau swasta pada setiap provinsi berada dalam kewenangan Kemendikbud di Indonesia tahun 2020-2022, dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Dana BOS} = (\text{BOS SMA} + \text{BOS SMK})$$

Sumber : (Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022)

- b. DAK Fisik Bidang Pendidikan (X_2) SMA/SMK di Provinsi Jawa Barat dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut :

$$\text{DAK Fisik} = (\text{DAK SMA} + \text{DAK SMK})$$

Sumber : (Peraturan Menteri pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022)

- c. Belanja fungsi pendidikan pada APBD (X_3) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Belanja Fungsi Pendidikan} = (\text{Belanja Modal} + \text{Belanja Barang} + \text{Belanja Pegawai} + \text{Bantuan Sosial} + \text{Bantuan Keuangan} + \text{Belanja Hibah})$$

Sumber : (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.07/2009)

2. Variable dependen atau variabel terikat (Y)

Dalam penelitian ini variabel dependen atau variabel terikat (Y) adalah APK.

Rumus perhitungan APK SMA/SMK di bawah tanggung jawab Kemendikbud dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$APK\ SM = \frac{\text{Jumlah Murid SM/Sederajat}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16-18 tahun}} \times 100\%$$

Sumber : (Suparman et al., 2022)

Skala Pengukuran yang digunakan, baik variabel independen atau variable dependen menggunakan skala rasio.

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan metode dokumentasi dan studi kepustakaan dari sumber data sekunder dari Kemendikbud melalui situs resmi www.bos.kemdikbud.go.id, dan apkpm.data.kemdikbud.go.id serta DJPK Kementerian Keuangan melalui situs resmi www.djpk.kemenkeu.go.id.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik parametrik. Tipe data dalam penelitian ini menggunakan data panel dengan bantuan program Eviews 12. Analisis data panel yang akan dilakukan melalui 3 estimasi untuk mendapatkan hasil dari model terbaik. Adapun model tersebut terdiri dari *Common effect Model (CEM)*, *Fixed effect Model (FEM)* dan *Random effect Model (REM)*. Pengujian melalui uji F *Restricted (Chow Test)*, *Uji Hausman* dan *Uji Lagrange Multiplier (LM)* yang telah dilakukan maka model yang paling tepat adalah *Random Effect Model*. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji T dan Koefisien Determinasi.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Hasil Analisis Data

Analisis Deskriptif

Rata-rata APK di 34 provinsi pada tahun 2020-2022 mencapai 98,04, menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan yang secara umum baik. Nilai tertinggi sebesar 116,12 terdapat di Sulawesi Tenggara, angka diatas 100% dapat terjadi karena adanya siswa di luar rentang usia 16-18 tahun, baik yang terlambat atau lebih cepat masuk sekolah, dipengaruhi oleh dukungan pendidikan yang kuat baik infrastruktur yang memadai, serta jumlah sekolah yang merata di berbagai wilayah. Selain itu, tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, didorong oleh

kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi keluarga yang lebih baik untuk dapat bersekolah berkontribusi pada tingginya APK.

Sebaliknya, Papua mencatat APK terendah sebesar 65,31, mencerminkan partisipasi pendidikan yang rendah dibawah rata-rata nasional dan perlunya perhatian khusus dari pemerintah, karena menghadapi tantangan geografis seperti pegunungan dan pedalaman, yang menyulitkan akses ke sekolah. Infrastruktur jalan dan transportasi yang terbatas, kekurangan sekolah dan guru, serta fasilitas belajar yang minim dalam proses belajar mengajar. Selain itu, faktor ekonomi membuat banyak keluarga kesulitan melanjutkan pendidikan, sementara di daerah pedalaman, kesadaran akan pentingnya pendidikan formal masih rendah terutama pada jenjang menengah. Untuk meningkatkan APK, diperlukan upaya memperkuat akses pendidikan di daerah tertinggal, membangun infrastruktur, serta program yang mendorong partisipasi pendidikan, terutama di wilayah dengan APK rendah.

Terdapat variasi yang signifikan dalam APK antarprovinsi, dengan sebagian besar daerah memiliki perbedaan sekitar 8,43 poin dari rata-rata. Meskipun secara umum baik, standar deviasi menunjukkan ketidakmerataan partisipasi pendidikan sehingga pemerataan akses pendidikan perlu menjadi fokus kebijakan.

Rata-rata Dana BOS di 34 provinsi pada tahun 2020-2022 mencapai Rp 454.344.081.465,88, menunjukkan besarnya dukungan pemerintah untuk operasional sekolah di setiap provinsi. Jawa Barat menerima dana tertinggi sebesar Rp 3.025.845.197.596,00, sementara Kalimantan Utara menerima dana terendah, Rp 40.621.291.000,00. Perbedaan ini mencerminkan jumlah siswa dan sekolah yang bervariasi, tetapi juga perbedaan yang sangat besar menunjukkan perlunya evaluasi untuk memastikan distribusi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah.

Standar deviasi 610.250.275.909,16, menunjukan ketimpangan distribusi dana BOS antarprovinsi dengan beberapa daerah menerima dana jauh di atas atau di bawah rata-rata. Alokasi dana bergantung pada data siswa yang valid per sekolah dimana peran sekolah memastikan keakuratan data siswa, sementara pemerintah provinsi mengawasi, memverifikasi, dan menetapkan alokasi dana BOS. Sehingga perbedaan ini bisa mencerminkan perbedaan kebutuhan atau masalah dalam pengelolaan data. Evaluasi

lebih lanjut diperlukan untuk memastikan dana BOS terdistribusi secara merata dan sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

Rata-rata alokasi DAK Fisik Pendidikan di 34 provinsi pada tahun 2020–2022 mencapai Rp 177.027.675.921,57, digunakan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan. Jawa Barat menerima alokasi tertinggi Rp 769.539.181.000,00 karena mempertimbangkan kebutuhan infrastruktur dengan jumlah siswa yang besar. Sementara itu, DKI Jakarta tidak mendapat dana, kemungkinan tidak mengajukan atau tidak memenuhi syarat untuk menerima dana karena infrastrukturnya sudah memadai. Sebagai pusat perekonomian, Jakarta mungkin lebih mengandalkan sumber daya lain seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga DAK Fisik lebih diprioritaskan untuk daerah-daerah yang masih membutuhkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan.

Dengan standar deviasi 109033383769,88, pendistribusian DAK Fisik antarprovinsi sangat timpang, di mana beberapa daerah menerima dana jauh lebih besar atau lebih kecil dari rata-rata. Ketimpangan ini bisa disebabkan oleh perbedaan kebutuhan, prioritas, atau kemampuan daerah dalam memenuhi syarat penerimaan dana. Evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan distribusi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik berupa pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan di seluruh provinsi.

Rata-rata Belanja Fungsi Pendidikan dalam APBD 34 provinsi pada tahun 2020–2022 mencapai Rp 3.128.400.283.718,35, menunjukkan dukungan pemerintah daerah terhadap pendidikan. DKI Jakarta mengalokasikan dana tertinggi, Rp 17.253.692.967.130,40, disebabkan oleh kapasitas fiskal besar, dan prioritas kebutuhan tinggi untuk pendidikan sebagai ibu kota karena memiliki banyak siswa, kebutuhan infrastruktur kompleks, serta pusat pendidikan terkemuka, bahkan standar pendidikan di provinsi ini umumnya lebih tinggi karena memiliki akses sumber daya yang lebih baik, baik dalam hal tenaga pengajar, infrastruktur, maupun teknologi. Sebaliknya, Kalimantan Utara memiliki alokasi terendah, Rp 511.259.379.047,74, kemungkinan karena kapasitas fiskal terbatas, jumlah penduduk dan jumlah sekolah yang sedikit, serta kebutuhan pendidikan yang lebih kecil dibandingkan provinsi lain.

Dengan standar deviasi 3660031988778,74, distribusi belanja pendidikan antarprovinsi sangat bervariasi, menunjukkan beberapa daerah mengalokasikan dana

jauh di atas atau di bawah rata-rata. Ketimpangan ini memerlukan kebijakan evaluasi untuk memastikan semua daerah mendapatkan dukungan finansial yang memadai bagi sektor pendidikan terutama daerah-daerah yang mengalokasikan dana yang sangat rendah..

Analisis Statistik Inferensial : Regresi Panel

Analisis regresi panel menggunakan 102 sampel. Setelah transformasi ln dan penghapusan outlier maka jumlah akhir sampel adalah 96 sampel.

Chow Test

Didasarkan pada uji chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas *cross section* adalah 0,0000 atau $< 0,05$, maka H_0 ditolak. Oleh karena itu model yang dipilih adalah *Fixed effect Model (FEM)*.

Hausman Test

Berdasarkan hasil uji hausman, nilai *probabilitas Cross-section random* yakni sebesar 0,3885 nilai tersebut lebih besar dari 0.05, ini berarti H_0 diterima sehingga model yang dipilih yakni *Random effect Model (REM)*.

Lagrange Multiplier

Berdasarkan hasil uji LM, nilai *probabilitas Cross-section Breusch-Pagan* yakni sebesar 0,000 nilai tersebut lebih kecil dari 0.05, ini berarti H_0 ditolak sehingga model *Random effect (REM)* lebih baik daripada metode *Common effect Model (CEM)*

Uji Asumsi Klasik Regresi Data Panel

Uji Normalitas

Dari hasil uji nilai *probability Jarque berra* sebesar $0,640076 > 0,05$, artinya residual hasil regresi panel berdistribusi normal.

Uji Multikolineritas

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel X1 dan X3 memiliki korelasi $> 0,8$ sehingga model mengalami multikolineritas. Untuk mengatasi multikolineritas, variabel X1 ditransformasikan menjadi $X1 = X1/X3$. Setelah transformasi, koefisien korelasi semua variabel menjadi $< 0,8$ sehingga model tidak lagi mengalami multikolineritas.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji masing-masing variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang nyata terhadap residual (probabilitas > 0.05), maka dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,6426. Dengan tiga variabel bebas, 96 sampel, dan tingkat signifikansi 0,05, diperoleh batas bawah (dl) 1,6039 dan batas atas (du) 1,7325, karena nilai *Durbin-Watson* berada di antara dl dan du, $dl(1.6039) < DW(1.6426) < du(1.7325)$, maka menerima keputusan yang ragu-ragu. Berdasarkan prinsip parsimony (prinsip kesederhanaan) dalam analisis statistik, disimpulkan bahwa model tidak mengalami autokorelasi.

Uji Hipotesis (Uji T)

Probabilitas $>$ taraf signifikansi 0,05 sehingga H_0 diterima, atau variabel bebas secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel terikat, sehingga dapat diartikan bahwa secara individu variabel Dana BOS, DAK Fisik Pendidikan, dan Belanja Pendidikan APBD tidak berpengaruh terhadap Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK.

Koefisien Determinasi

Nilai R-Squared 0,0266 dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel-variabel X hanya menjelaskan 2,66%, sementara 97,34% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian.

Pembahasan Hasil penelitian

Pengaruh Dana Bantuan Operasional Sekolah Terhadap Angka Partisipasi Kasar

Uji t menunjukkan bahwa BOS tidak berpengaruh signifikan terhadap APK, dengan nilai signifikansi $0,1630 > 0,05$ dan t-statistik -1,406316. Koefisien negatif pada dana BOS menunjukkan bahwa dana tersebut belum cukup mendorong peningkatan APK di seluruh provinsi Indonesia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Jasmina (2016), Suryadarma (2012), Reinnika & Svensson (2004), serta Arunatilake (2006), yang menunjukkan bahwa alokasi dana BOS tidak berpengaruh terhadap APK jenjang SMA/SMK. Sebaliknya, penelitian Rutfiana & Hayati (2020) menemukan hubungan positif dan signifikan antara dana BOS dan partisipasi siswa di SMA, didukung oleh temuan serupa dari Dahiri (2023), Aziz (2010), Ruwandari & Suharlina (2023), serta Bui et al. (2020).

Data menunjukkan bahwa provinsi dengan alokasi dana BOS tertinggi, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten, tidak mampu meningkatkan APK di atas rata-rata nasional. Sebaliknya, provinsi dengan alokasi BOS terendah, seperti Kalimantan Utara, Papua Barat, dan Gorontalo, justru dapat meningkatkan APK di atas rata-rata nasional.

Dana BOS tidak signifikan meningkatkan APK SMA/SMK karena dana BOS yang relatif kecil dibandingkan kebutuhan operasional. BOS hanya menanggung sebagian biaya pendidikan, sementara orang tua masih harus menanggung biaya langsung (Seragam, kegiatan sekolah) dan tidak langsung (transportasi dan kebutuhan pendukung lainnya). Apabila pendapatan masyarakat rendah, masyarakat akan sulit mengakses pendidikan.

Tidak berpengaruhnya dana BOS terhadap APK juga menyebabkan lemahnya akuntabilitas pengelolaan akibat kurangnya pemahaman dalam penggunaan dan pertanggungjawaban dana. Perlunya arahan juklak (petunjuk pelaksanaan) atau Petunjuk teknis (juknis) yang lebih jelas diperlukan agar BOS dapat lebih tepat guna dalam mendukung program wajib belajar 12 tahun. Word Bank (2020a, 2020b) menyoroti rendahnya kapasitas sekolah dalam mengelola dana BOS serta lemahnya pengawasan.

Meski pengelolaan BOS seharusnya melibatkan komite sekolah (Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016), namun pada nyatanya peran komite masih terbatas, dan pengawasan pemerintah pun belum optimal, sehingga rentan terjadi penyimpangan.

Pengaruh Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Terhadap Angka Partisipasi Kasar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan tidak berpengaruh terhadap APK, dengan nilai signifikansi $0.5946 > 0,05$ dan t-statistik 0.534081. Koefisien positif namun tidak signifikan menunjukkan bahwa peningkatan DAK Fisik tidak secara langsung meningkatkan APK, sehingga diperlukan kebijakan tambahan untuk memperluas akses pendidikan.

Hasil penelitian ini didukung oleh Sulaeman & Andriyanto (2021) , yang menemukan bahwa DAK Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan, sehingga perlunya perbaikan kebijakan tata kelola agar lebih optimal bagi pembangunan manusia

di daerah. Namun temuan ini berbeda dengan Adi Purwanto (2010) , Aziz (2010) , Aryfyani (2020), yang menyatakan bahwa DAK Pendidikan dapat meningkatkan APK di tingkat SD dan SMP. Temuan serupa dilakukan juga dilakukan oleh Hadiyanto et al. (2022), Hadi & Mahi (2024), Doriza et al. (2013).

Data menunjukkan bahwa alokasi DAK fisik Bidang Pendidikan tertinggi di Jawa Barat dan Jawa Tengah tidak mampu meningkatkan APK di atas rata-rata nasional. Sebaliknya, DKI Jakarta, dengan alokasi DAK fisik bidang pendidikan terendah, justru mencatat APK lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan DAK fisik bidang pendidikan kurang diimbangi dengan peningkatan kualitas pembelajaran dan manajemen sekolah.

Evaluasi jangka menengah atau panjang diperlukan untuk menilai efektivitas DAK fisik pendidikan dalam meningkatkan kualitas dan akses pendidikan, selain dari monitoring tahunan. Selain itu, diperlukan indikator kinerja berbasis output untuk mendorong efektivitas DAK fisik bidang pendidikan, seperti tingkat partisipasi sekolah. Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi keluarga, geografis, beasiswa, biaya transportasi, dan persepsi masyarakat terhadap pendidikan memiliki dampak lebih besar terhadap APK dibandingkan peningkatan infrastruktur fisik.

Pengaruh Belanja Fungsi Pendidikan Pada APBD Terhadap Angka Partisipasi Kasar

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Fungsi Pendidikan tidak berpengaruh terhadap APK. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,1911 > 0,05$ dan t-statistik $-1,317054$, Belanja Fungsi Pendidikan tidak berpengaruh terhadap APK. Koefisien negatif menunjukkan bahwa alokasi anggaran pendidikan yang lebih tinggi tidak selalu berkorelasi meningkatkan APK.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jasmina (2016) mengungkapkan bahwa belanja pemerintah daerah untuk pendidikan tidak berpengaruh terhadap hasil pendidikan di Indonesia, didukung oleh penelitian Rajkumar & Swaroop (2008) , Prasetyo & Nasution (2017), Ferina et al. (2015), Halim et al. (2010), R & Yulhendri (2020), Khiem et al. (2020), Rahmawati (2020) dan Yanti et al. (2023) dan lainnya. Namun temuan ini berbeda dengan penelitian Tsani & Rivai Febriantono (2018) , Faguet & Sánchez (2008) , Aziz (2010), Jolianis (2015) yang menyatakan bahwa semakin besar belanja daerah untuk pendidikan, semakin tinggi tingkat partisipasi

sekolah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Wardani & Arsandi (2020) menunjukkan bahwa belanja pendidikan berpengaruh signifikan terhadap akses pendidikan.

Data dari 34 provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa daerah dengan anggaran pendidikan tertinggi, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten, tidak selalu memiliki APK di atas rata-rata nasional. Sebaliknya, provinsi dengan anggaran pendidikan terendah, seperti Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Papua Barat dan Gorontalo, justru memiliki APK diatas rata-rata nasional.

Belanja pendidikan yang tidak berpengaruh terhadap APK dapat disebabkan oleh pengelolaan anggaran yang lemah, alokasi yang tidak tepat, serta prioritas belanja fungsi yang berbeda di setiap provinsi dalam mengalokasikan dana yang ada, Sebagian besar dana pada belanja fungsi pendidikan dialokasikan untuk gaji pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja pendidikan lainnya dibandingkan untuk investasi yang langsung meningkatkan APK.

Dengan demikian, tinggi atau rendahnya belanja pendidikan bukanlah faktor utama dalam peningkatan APK. APK lebih dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi, ketersediaan infrastruktur transportasi, jarak ke sekolah, atau dukungan keluarga serta beasiswa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dibahas setelah dilakukan pengujian dan analisis data, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. BOS Tidak Berpengaruh terhadap APK SMA/SMK. BOS tidak meningkatkan APK SMA/SMK karena kontribusinya terhadap total biaya pendidikan masih kecil. BOS tidak mampu menutup seluruh biaya operasional sekolah, sehingga orang tua tetap harus menanggung biaya tambahan berupa biaya langsung (seragam, kegiatan sekolah) dan tidak langsung (transportasi). Lemahnya akuntabilitas pengelolaan dana BOS juga menghambat efektivitas dan efisiensi, sehingga perlu pengawasan agar penggunaan dana BOS dapat optimal.
2. DAK Fisik Bidang Pendidikan Tidak Berpengaruh terhadap APK. DAK Fisik tidak berdampak pada APK karena pemanfaatannya kurang diimbangi dengan peningkatan kualitas pembelajaran dan manajemen sekolah. Evaluasi jangka menengah dan panjang serta indikator kinerja berbasis output diperlukan untuk memastikan penggunaan DAK lebih efektif dalam meningkatkan kualitas dan akses pendidikan.

Evaluasi dapat digunakan sesuai kebutuhan sekolah, sehingga memberikan manfaat yang lebih optimal dan terhindar dari potensi penyalahgunaan dana.

3. Belanja Fungsi Pendidikan pada APBD Tidak Berpengaruh terhadap APK. Pengeluaran pendidikan oleh pemerintah provinsi belum signifikan meningkatkan partisipasi siswa SMA/SMK. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan yang lemah, alokasi yang tidak tepat, selain itu tidak semua provinsi mengutamakan belanja fungsi pada belanja fungsi pendidikan karena masing-masing provinsi memiliki prioritas kebutuhan bidang yang berbeda-beda dalam mengalokasikan dana yang ada. Sebagian besar dana pada belanja fungsi pendidikan cenderung digunakan untuk gaji pegawai, barang, dan jasa serta belanja pendidikan lainnya dibandingkan program investasi yang secara langsung meningkatkan partisipasi SMA/SMK.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan yang telah dipaparkan, beberapa saran yang dapat dijadikan masukan adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan pemantauan dan evaluasi program pemerintah terkait dengan ada tidaknya pengaruh program/kegiatan terhadap outcome yang diharapkan. Peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas sangatlah penting, karena penambahan dana pendidikan tidak akan efektif tanpa perbaikan tata kelola.
2. Alokasi anggaran pendidikan sebaiknya lebih besar dari 20% yang diamanatkan undang-undang, baik dalam APBN maupun APBD.
3. Pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas pembangunan agar anak tidak terpaksa bekerja dan dapat bersekolah lebih lama. Program bantuan bagi siswa miskin dan daerah tertinggal perlu dilanjutkan untuk mendukung biaya-biaya tidak langsung dalam memperoleh akses pendidikan seperti biaya transportasi.
4. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, terutama pendidikan lanjutan, harus terus ditingkatkan. Pendidikan yang lebih tinggi dapat meningkatkan kualitas SDM manusia dan mempermudah akses ke dunia kerja.
5. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan variabel lain yang dapat mempengaruhi partisipasi pendidikan. Memperluas jangkauan penelitian untuk dapat mencapai program wajib belajar 12 tahun mulai dari jenjang SD, SMP dan SMA, serta memasukkan variabel penelitian yang dikelola oleh Kementerian Agama.

Keterbatasan Peneliti

Peneliti Menyadari Adanya keterbatasan dalam penelitian ini, baik dalam pemilihan variabel maupun rentang waktu penelitian yang digunakan hanya pada tahun 2020-2022 serta objek penelitian terbatas pada pemerintah provinsi di Indonesia. Penelitian ini hanya mencakup penyaluran dana BOS dan APK yang dikelola oleh Kemendikbud untuk jenjang SMA/SMK. Selain itu, DAK Fisik bidang pendidikan juga dibatasi pada SMA/SMK, tanpa melibatkan jenjang SD atau SMP. Analisis yang dilakukan mencakup sebagian faktor, sehingga masih terbuka peluang untuk mengeksplorasi faktor tambahan dalam penelitian mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Purwanto, D. (2010). Decentralization And its Impact On Primary Education Outcomes. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 25(1), 41–58.
- Arunatilake, N. (2006). Education participation in Sri Lanka-Why all are not in school. *International Journal of Educational Research*, 45(3), 137–152. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2006.11.001>
- Aryfyani, D. (2020). *Kinerja sektor pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T) dan non 3T: Peran dana alokasi khusus (DAK) sektor pendidikan = Kinerja sektor pendidikan di daerah tertinggal dan maju di Indonesia: Peran dana alokasi khusus pendidikan*. [Universitas Indonesia]. <https://lib.ui.ac.id/m/detail.jsp?id=20502956&lokasi=lokal>
- Aziz, A. (2010). Pengaruh Program pemerintah Bidang pendidikan Terhadap APK Wajar 2006-2008. *Kajian Ekonomi Keuangan*, 14(1).
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Angka Partisipasi Kasar (APK)*. Badan Pusat Statistik. <https://sirusa.web.bps.go.id/index.php/indikator/565>
- Bui, T. A., Nguyen, C. V., Nguyen, K. D., Nguyen, H. H., & Pham, P. T. (2020). The effect of tuition fee reduction and education subsidy on school enrollment: Evidence from Vietnam. *Children and Youth Services Review*, 108. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.104536>
- Dahiri. (2023). Pengaruh Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 8(2), 2541–5557.
- Doriza, S., Purwanto, D. A., & Maulida, E. (2013). Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Disparitas Akses Pendidikan Dasar di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(2), 223–233.
- Dwiputrianti, S. (2012). *Kebijakan Penetapan Tarif Barang Publik dan Swasta: Teori, Konsep dan Aplikasi* (1st ed.). STIA LAN Bandung Press.
- Faguet, J. P., & Sánchez, F. (2008). Decentralization's Effects on Educational Outcomes in Bolivia and Colombia. *World Development*, 36(7), 1294–1316. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.06.021>
- Faustine, P., & Sutoko, M. S. (2005). Compatibility of Higher Education Program With Professional Employment: a Strategic Perspective on Educational Funding Effectiveness. *Journal Of Institutional Research South East Asia*, 3(2).

- Ferina, I. S., Rohman, A., & Ermadiani. (2015). Pengaruh belanja Pendidikan, Ekonomi dan Pelayanan Umum Terhadap partisipasi Sekolah Provinsi Sumatera Selatan. *Majalah Ilmiah Srieijaya*, XX(12).
- Hadi, S., & Mahi, B. R. (2024). Peran Dana Alokasi Khusus Fisik Afiriasi Terhadap Pembangunan Pendidikan Daerah Tertinggal Di Indonesia. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 9(1).
- Hadiyanto, Prasetyo, T. D., Merini, D., & Yalisman, F. (2022). Menakar keefektifan Mandatory Spending Bidang Pendidikan. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 7(2).
- Halim, A., Agus, & Marwadin. (2010). *Hubungan anggaran belanja pendidikan dengan angka partisipasi sekolah, Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten-Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah* [Universitas Gadjah Mada]. https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/45316
- Jasmina, T. (2016). Public Spending and Learning Outcomes of Basic Education at the District Level in Indonesia. *Economics and Finance in Indonesia*, 62(3), 180–190. www.djpk.go.id
- Jolianis. (2015). Pengaruh alokasi anggaran sektor pendidikan pendapatan perkapita dan pendidikan. *Journal of Economis and Economic Education*, 3(2), 168–183.
- Kemendikbudristek. (2023). *Laporan Kinerja 2022*. Kemnendikbudristek.
- Kementerian Keuangan. (2015). Kajian Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Sekolah Menengah Atas. *Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan*.
- Kementerian Keuangan. (2023). *Informasi APBN 2023* (Dit. P. DJA, Ed.; Kementerian Keuangan).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). *Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No 80 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Menengah Universal*. www.djpp.kemendikbud.go.id
- Kementerian Pendidikan, K. R. dan T. (2022). *Kebijakan DAK Fisik Pendidikan*. Biro perencanaan. <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/upload/filemanager/download/DAK/Kebijakan%20DAK%20Fisik%202022.pdf>
- Khairunnisa, K. ;, Hartoyo, S. ;, & Anggraeni, L. (2014). Determinan Angka Partisipasi Sekolah SMP di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 15(1). <https://doi.org/10.21002/jepi.v15i1.05>
- Khiem, P. H., Linh, D. H., Tai, D. A., & Dung, N. D. (2020). Does tuition fee policy reform encourage poor children's school enrolment? Evidence from Vietnam. *Economic Analysis and Policy*, 66, 109–124. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2020.03.001>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.07/2009 Tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (2009).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.07/2009 Tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Departemen keuangan (2009).
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2016).

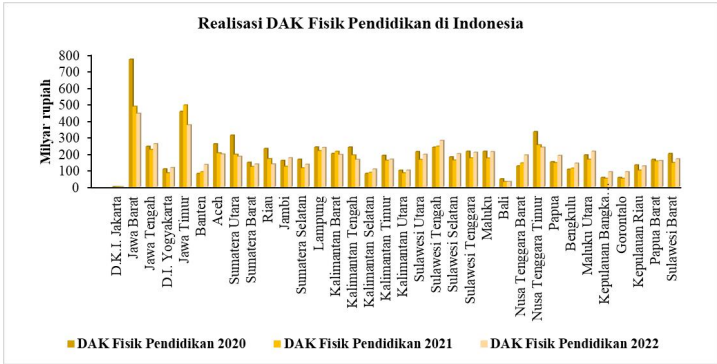
- Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (2022).
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (2022).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (2022).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (2020).
- Perubahan Ke Empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2002).
- Prasetyo, A., & Nasution, M. (2017). Pengaruh Belanja Fungsi pendidikan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas SDM Daerah Tertinggal. *JURNAL BUDGET*, 2(2).
- Pratiwi, F. A. (2018). *Indikator Pendidikan di Indonesia*.
- Pusdatin Kemendikbudristek. (2024). *Neraca Pendidikan*. Kemendikbudristek. <https://npd.kemdikbud.go.id/>
- Puspita, D., Pahlevi, M., Raharja, Y. M., Hadi, S., Baroto, A. L., Permana, A. W., Rahayu, W. T., Prasetya, F., Chalil, T. M., & Soewardi, T. J. (2021). *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. Badan Kebijakan Fiska.
- R, M. A., & Yulhendri, Y. (2020). Pengaruh Anggaran Pendidikan, Jumlah Guru dan Jumlah Kelas terhadap Partisipasi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ecogen*, 3(1), 155. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v3i1.8534>
- Rahmawati, P. (2020). Pengaruh Program Bos terhadap Keputusan Anak Putus Sekolah. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 3(1), 680–697. <https://doi.org/10.15294/efficient.v3i1.35970>
- Rajkumar, A. S., & Swaroop, V. (2008). Public spending and outcomes: Does governance matter? *Journal of Development Economics*, 86(1), 96–111. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2007.08.003>
- Ridwan, & Nawir, I. S. (2021). *Buku Ekonomi Publik* (M. F. Ridwan, Ed.; 1st ed.). Pustaka Pelajar.
- Rutfiana, R. T., & Hayati, B. (2020). Analisis Pengaruh Pemberian Dana Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017. *JOURNAL OF ECONOMICS*, 9(2).
- Sari, L. S., Purwadi, A., Sulistiono, A. A., & Suryawati, D. (2019). *Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (ke-1)*. Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. <https://litbang.kemdikbud.go.id>
- Shaleh, K. (2014). Pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan Terhadap Tingkat Kelulusan Dasar dan Pendidikan Menengah. *Economics Dan Business*.
- Sulaeman, A. S., & Andriyanto, N. (2021). *Optimalisasi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Mendorong Pertumbuhan Pembangunan Daerah di Indonesia*. 5(2).
- Suparman, Muzakir, Wahyuningsih, & Anwar, C. (2022). *Pembangunan Kependudukan* (N. H. Sholihah, Ed.; 1st ed.). Publika Indonesia utama.

- Todaro, P. M., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi* (9th ed.). Erlangga. https://books.google.co.id/books?id=m8kMk_KbSX4C&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false
- Tsani, T., & Rivai Febriantono, A. (2018). Efisiensi Belanja Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pengaruhnya Terhadap Pemenuhan Akses Pendidikan Menengah di Indonesia. *Jurnal Anggaran Keuangan Negara Indonesia*, 2(1). <https://doi.org/doi.org/10.33827/akurasi2018.vol2.iss1.art36>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003).
- UNESCO. (2009). *Education Indicators Technical Guidelines*. UNESCO institute for Statistics.
- Wardani, F., & Arsandi, S. A. (2020). Pengaruh Belanja Pendidikan pemerintah Daerah terhadap Akses Pendidikan Dasar dan Menengah di Tingkat Kabupaten/Kota. *Simposium Nasional Keuangan Negara*.
- Word Bank. (2020a). *Revealing How Indonesia's Subnational Governments Spend their Money on Education: Subnational Education Public Expenditure Review 2020*. The World Bank Group. www.worldbank.org
- Word Bank. (2020b). The promise of education in Indonesia. In *Word Bank*. The World Bank Group. <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/the-promise-of-education-in-indonesia>
- Yanti, A. T., Intikhanah, S., & Fatah, K. (2023). Pengaruh Belanja pendidikan, Jumlah Guru, dan Tingkat kemiskinan Terhadap Partisipasi Sekolah. *Jurnal Neraca*, 19(1).
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

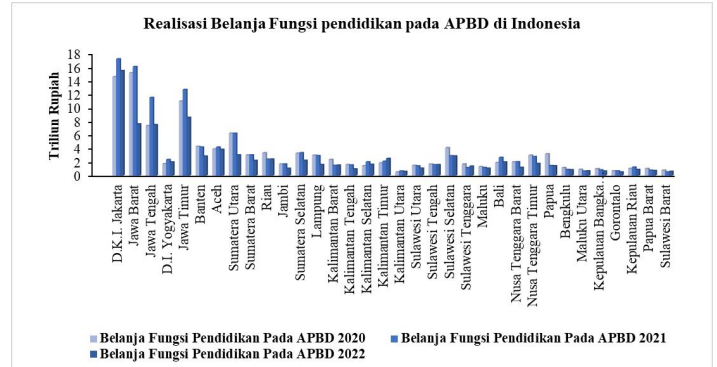
GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL



Grafik 1. Realisasi Dana Program BOS Pemerintah Provinsi di Indonesia
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat



Grafik 2. Realisasi DAK Fisik pendidikan Pemerintah Provinsi di Indonesia
Sumber: DJPK Kemenkeu (Data Diolah)



Grafik 3. Realisasi Belanja Fungsi pendidikan pada APBD Pemerintah Provinsi di Indonesia
Sumber: DJPK Kemenkeu (Data Diolah)



Grafik 4. Angka Partisipasi Kasar Pemerintah Provinsi di Indonesia
Sumber: Kemendikbud

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	Angka Partisipasi Kasar (Y)	Dana Bantuan Operasional Sekolah (X1)	Alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (X2)	Belanja Fungsi Pendidikan Pada APBD (X3)
Mean	98,04	454344081465,88	177027675921,57	3128400283718,35
Min	65,31	40621291000,00	0,00	511259379047,74
Max	116,12	3025845197596,00	769539181000,00	17253692967130,40
Stdev	8,43	610250275909,16	109033383769,88	3660031988778,74

Sumber: Eviews 12

Tabel 7. Hasil Regresi Panel setelah Metode Random Effect dengan Mentransformasi Variabel X1

Dependent Variable: Y				
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 07/07/24 Time: 13:00				
Sample: 2020 2022				
Periods included: 3				
Cross-sections included: 32				
Total panel (balanced) observations: 96				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.276287	0.535689	9.849542	0.0000
X1	-0.485505	0.345232	-1.406316	0.1630
X2	0.007776	0.014560	0.534081	0.5946
X3	-0.015334	0.011642	-1.317054	0.1911
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.061103	0.8573
Idiosyncratic random			0.024929	0.1427
Weighted Statistics				
Root MSE	0.024422	R-squared		0.026637
Mean dependent var	1.052797	Adjusted R-squared		-0.005103
S.D. dependent var	0.024884	S.E. of regression		0.024947
Sum squared resid	0.057258	F-statistic		0.839216
Durbin-Watson stat	1.642574	Prob(F-statistic)		0.475793
Sumber: Minitab 17				
Unweighted Statistics				
R-squared	0.029782	Mean dependent var		4.591912
Sum squared resid	0.393715	Durbin-Watson stat		0.238880